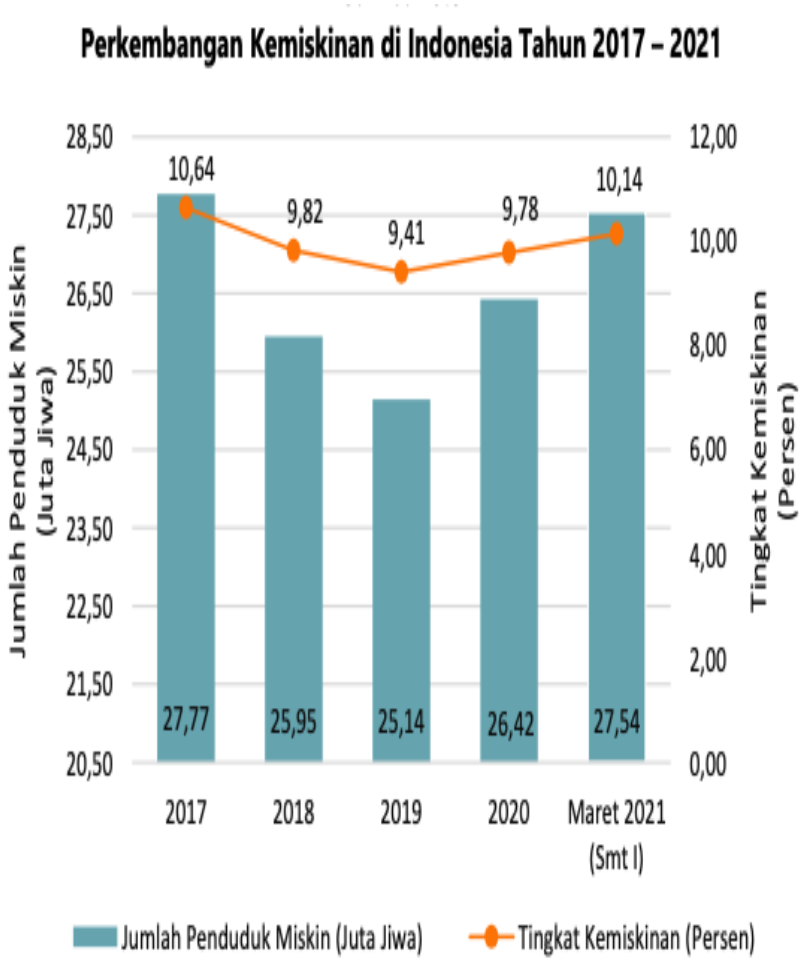
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

ATENSI

DINAMIKA DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMENTERIAN SOSIAL RI

25 Agustus 2021

PROFIL KEMISKINAN INDONESIA 2017 - 2021



Sumber: BPS, Maret 2017-2021

Realisasi Bantuan Sosial bagi Penduduk Miskin dan Rentan Tahun 2019-2021

Uraian	Satuan	2019	2020	Semester I	
				2020	2021
Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga	9.640.823	10.000.000	10.000.000	9.886.724
Program Kartu Sembako/BPNT	Keluarga	15.020.323	19.037.175	18.855.243	14.638.402
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	Jiwa	96.513.114	96.182.856	96.411.321	96.401.929
Program Indonesia Pintar (PIP)*)	Siswa	17.927.308	18.092.876	6.011.286**	8.438.095***
Bantuan Sosial Tunai (BST)	Keluarga	N/A	9.233.523	N/A	8.882.955
Bansos Sembako Jabodetabek	Keluarga	N/A	1.871.659 (Tahap XII)	1.899.924 (Tahap VI)	N/A****
Bansos Tunai Non Jabodetabek	Keluarga	N/A	9.281.557	8.496.288	N/A****

Sumber : Kementerian Sosial, 2019-2021
Keterangan: * Data Kementerian Pendidikan
** Realisasi sampai akhir bulan Maret 2020
*** Realisasi sampai akhir bulan Maret 2021
**** Kategori bantuan sosial temporer saat pandemi COVID-19 dan melebur menjadi satu program Bantuan Sosial Tunai (BST)

- Pencapaian angka kemiskinan satu digit pada Maret 2018 sebesar 9,82% merupakan prestasi sekaligus tantangan dalam mencapai target kemiskinan selanjutnya.
- Pandemi Covid-19 mulai merebak Maret 2020 berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Maret 2020 sebesar 0,37%.
- Tingkat kemiskinan sempat naik menjadi 10,19% pada September 2020, namun demikian berhasil diturunkan menjadi 10,14% pada Maret 2021 melalui rangkaian bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

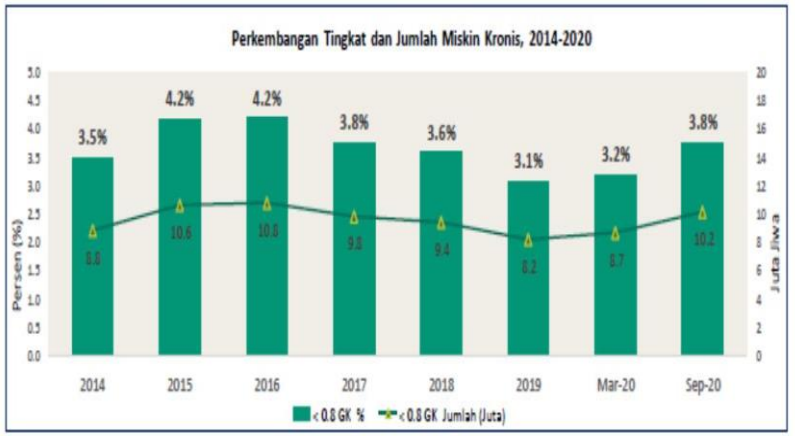
Sumber: Lampiran Pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-76 RI

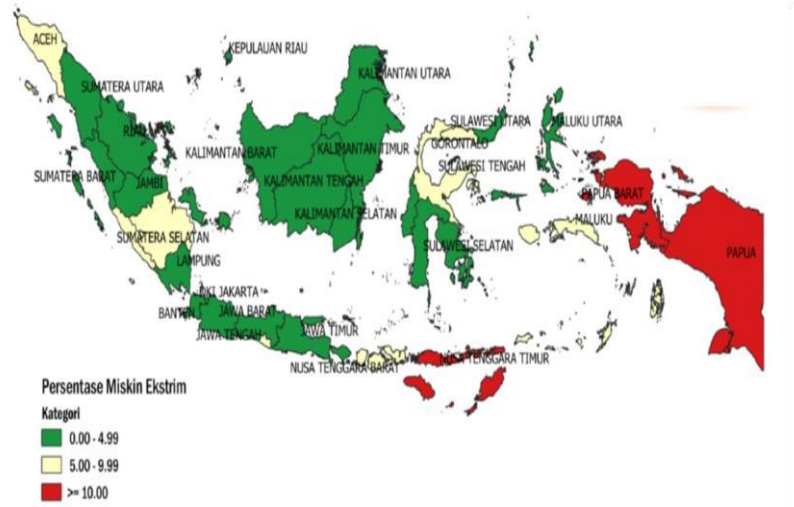
PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN EKSTRIM 2014-2020

Arahan Presiden Joko Widodo Pada sidang Paripurna di Istana Negara :



1. Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya dalam kategori kemiskinan ekstrem/miskin kronis.
2. Saat ini angka kelompok miskin kronis atau *ekstreme poverty* masih berada pada kisaran 2,5 - 3 persen dari total penduduk.
3. Presiden menargetkan penuruan angka kelompok miskin kronis mencapai 0% pada 2024.





- Kemiskinan ekstrim sebelum pandemi (2015-2019) menurun secara perlahan rata-rata 800 ribu orang per tahun.
- Target kemiskinan ekstrim “NOL” pada akhir 2024 diharapkan pada range 0-1% atau maksimum 3 juta miskin ekstrim pada tahun tersebut.
- Untuk mencapai target tersebut, kita harus mengentaskan miskin ekstrim rata-rata 1,8-2 juta orang per tahun.
- Sementara pada masa pandemi Kemiskinan ekstrim meningkat
- Proporsi kemiskinan ekstrim cenderung tinggi di Indonesia Timur (Maret 2020)

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20210105/9/1338805/jokowi-targetkan-kelompok-miskin-kronis-jadi-nol-persen-pada- 2024. Tgl 5 Januari 2021 dan https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/15183991/jokowi-targetkan-kemiskinan-ekstrem-hilang-pada-2024?page=all. Tanggal 04/03/2020

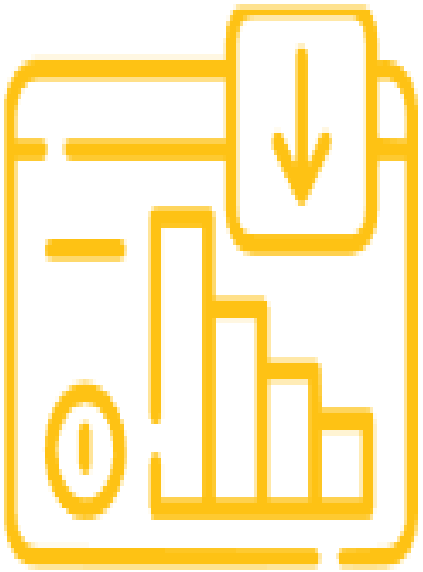
Sumber: BPS, Susenas 2014-2020

Kerangka Utama Penurunan Kemiskinan Ekstrim

Kebijakan Makro:

Menjaga stabilitas makro ekonomi. stabilisasi harga. penciptaan lapangan kerja produktif. menjaga iklim investasi. regulasi perdagangan. meningkatkan produktifitas sektor pertanian. dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Kebijakan Mikro :



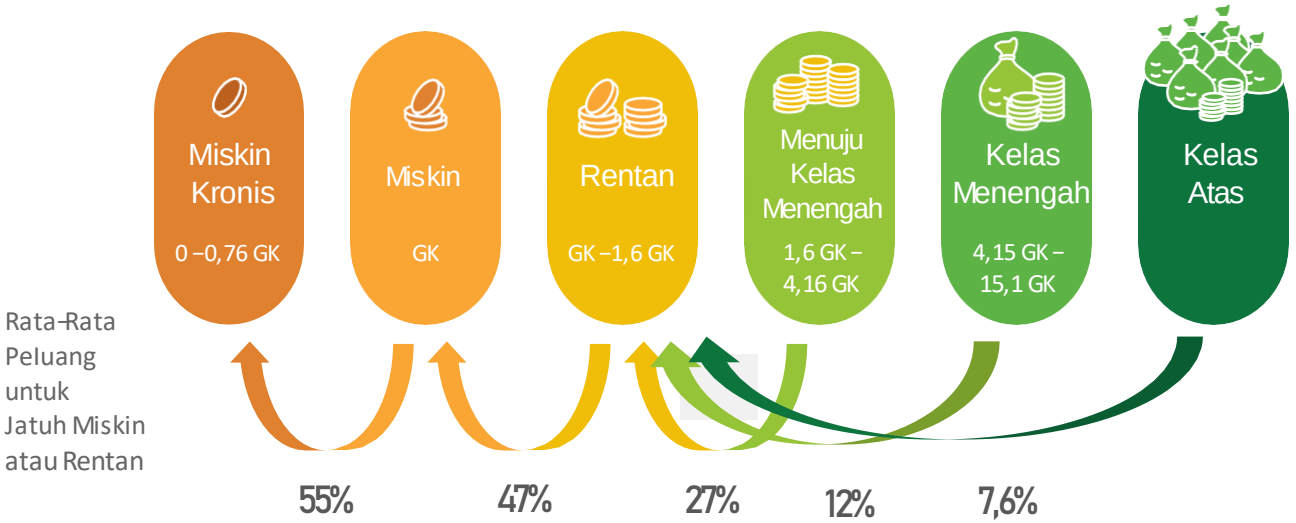
MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN	MENINGKATKAN PENDAPATAN
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Sembako	Peningkatan akses permodalan
Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)	Peningkatan aset produktif, seperti: lahan
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha
Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar	Pengembangan kewirausahaan. kemitraan. dan keperantaraan

Sistem Perlindungan Sosial Menyeluruh Mendukung Pengurangan Kemiskinan Ekstrem 0%

Sumber: Paparan Bappenas Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penurunan Kemiskinan Ekstrem, 5 Agustus 2021

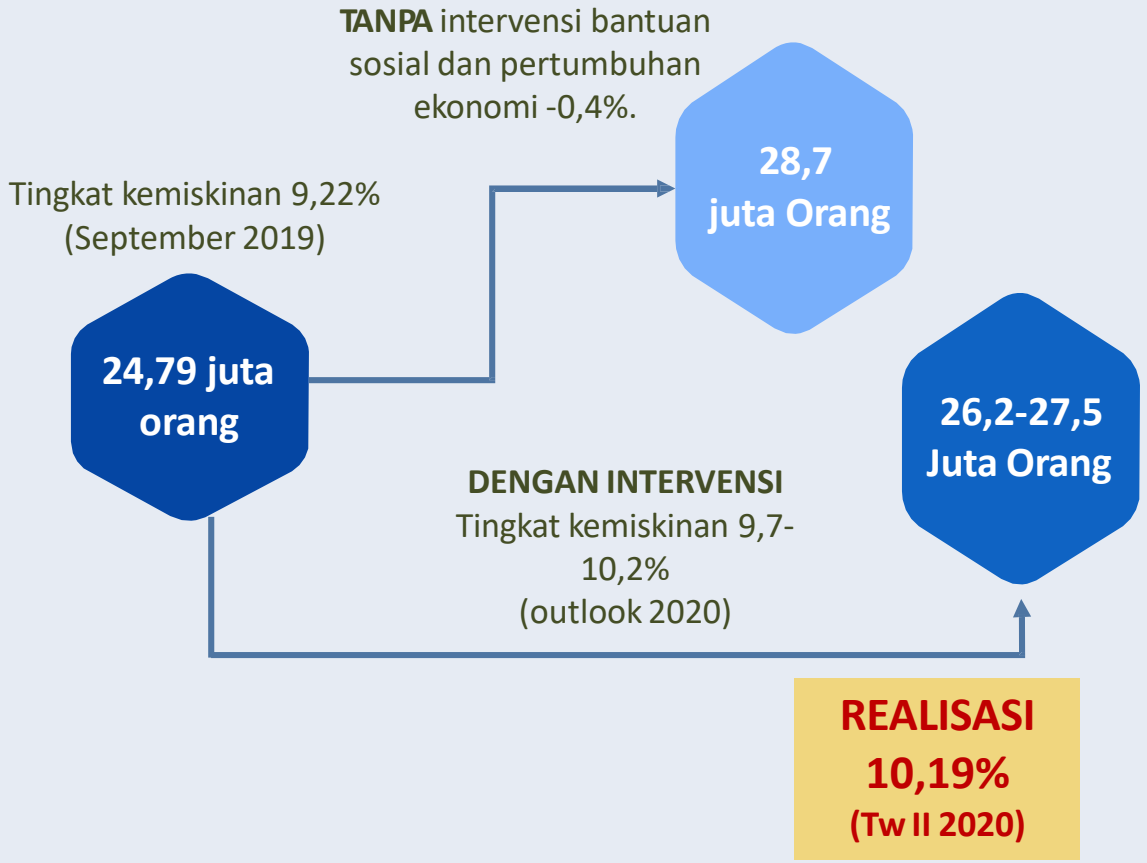
Highlight Kondisi Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19

COVID-19 Meningkatkan Kerentanan Masyarakat untuk Jatuh Miskin



- Kajian Bappenas menunjukkan bahwa penduduk miskin mempunyai peluang untuk jatuh miskin sekitar 55% karena dampak Covid-19.
- World Data Lab memperkirakan Indonesia menjadi negara ke 3 dengan penambahan jumlah kemiskinan kronis terbesar di dunia.

Sumber: Susenas 2019, dihitung Bappenas berdasarkan kajian kerentanan



Perkiraan Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Selama Pandemi
Dengan dan Tanpa Intervensi

Sumber: Susenas 2019, dihitung dan disimulasikan oleh Bappenas

Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Perekonomian Keluarga

Studi SMERU Research Institute dan UNDP, 2021



3 dari 4 mengalami **penurunan pemasukan**



1 dari 2 pekerja sektor formal **beralih ke sektor informal**



1 dari 2 **tidak memiliki tabungan** yang mencukupi kebutuhan



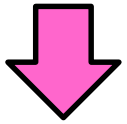
9 dari 10 **bisnis keluarga terdampak**



a. 75,3% rumah tangga yang mengalami penurunan pemasukan sudah memiliki anak.
b. Sekitar 2.1 juta anak berada dalam kemiskinan.



68,3% responden mengaku bahwa uang dan masalah pekerjaan merupakan sumber depresi dan kecemasan





Hanya 7,5% bisnis keluarga yang menerima bantuan.

*berdasarkan hasil survei terhadap 12.216 Rumah Tangga di 34 Provinsi di Indonesia pada Oktober-November 2020.

Peran Perlindungan Sosial dalam Merespon Krisis

Peran perlindungan sosial dalam merespon krisis:



Memastikan masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan secara efektif.



Support job dan *income security* untuk orang yang terdampak krisis.



Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk

Kelompok miskin dan rentan (sebagai prioritas) yang mendapatkan perlindungan sosial:



Lansia dan penyandang disabilitas



Orang dengan penyakit kronis



Negara dengan mayoritas informal sektor



Self-employed yang tidak ter-cover jaminan sosial



Pekerja domestik dan pekerja migran yg tidak tercover jaminan sosial



Tunawisma dan mereka yang tinggal di pemukiman informal



Wanita yang mayoritas menjadi pekerja dan kepala keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
PENANGANAN COVID-19 PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PC-PEN)

Desil Pendapatan Masyarakat	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kartu Sembako	Diskon Listrik	Bantuan Sosial Tunai	BLT Desa*	Subsidi Kuota Internet	Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah	Bantuan Beras Bulog	Kartu Sembako PPKM
6+						38,1 Juta Penerima	5,6 juta Orang + 2,8 Juta Orang**		
5			32,6 Juta Rumah Tangga	10 juta Keluarga	8 juta Keluarga	PAUD (7GB/bln), siswa SD-SMA (10GB/bln), Mahasiswa (15GB/bln), Guru (12GB/bln), dan Dosen (15GB/bln), 1 GB sebesar Rp2.750		10 juta Keluarga BST dan 18,8 Juta Keluarga Sembako	5,9 juta Keluarga usulan Pemda
4							Pra Kerja Pelatihan: Rp1 jt Insentif: Rp600 rb/bln Survei (3x): Rp50 rb		
3		18,8 juta Keluarga	RT 450 VA, diskon 100% pada Jan-Mar, 50% pada Apr-Des	Rp300 rb/bln	Rp300 rb/bln				Rp200 rb/Bulan
2	10 juta Keluarga	Rp200rb/bln					BSU: Rp1,2 juta dalam sekali penyaluran		
1	Per Tahun: Hamil dan Anak Usia Dini Rp3 Jt, SD Rp900rb, SMP Rp1,5 Jt, SMA Rp 2 Jt, Disabilitas dan Lansia Rp2,4 Jt	Juli dan Agustus dibayarkan dua kali	RT 900 VA, diskon 50% pada Jan-Mar, 25% pada Apr-Des	DTKS di luar penerima PKH dan Kartu Sembako	di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, Bansos Tunai, dan Kartu Pra Kerja	Peserta dan Tenaga Ddidik		10 kg/Keluarga	di luar Penerima PKH, Kartu Sembako, dan BST
Jangka Waktu	bulanan selama 12 bulan	bulanan selama 12 bulan + 2 bulan	9 Bulan (Jan-Sept) + 3 Bulan (Okt-Des)	6 bulan	12 bulan (Jan-Des)	10 bulan (Jan-Mei + Agt-Des)	Insentif untuk 4 bulan (Pra Kerja)	Sekali Penyaluran pada Juli	6 bulan (Jul-Des)
Alokasi + Tambahan (Rp T)	28,31	43,37 + 7,52 = 49,89	7,58 + 1,91 = 9,49	17,46	28,8	3 + 5,54 = 8,54	20 + 10 = 30	3,58	7,08

*dilakukan relaksasi targeting KPM BLT Desa dengan memberikan kewenangan lebih pada Kepala Desa

**teknis program akan dibahas dengan PMO Pra Kerja dan Kemenaker

Warna Merah: Tambahan Program

Sumber: Bahan Menkeu pada Konferensi Pers Pelaksanaan PPKM Darurat

BANTUAN SOSIAL PC PEN TAHUN 2021
KEMENTERIAN SOSIAL

PAGU
Rp88.007.628.950.000,-*

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
- 10 juta KPM
- Nilai bansos sesuai dengan komponen/kondisionalitas KPM disalurkan dalam 4 tahap

KARTU SEMBAKO/BPNT
- 18,8 juta KPM
- Rp200.000,-/bulan/KPM selama 12 bulan
- Tambahan 2 x penyaluran di bulan Juli

KARTU SEMBAKO USULAN PEMDA
- 5,9 juta KPM
- Rp200.000,-/bulan/KPM selama 6 bulan

BANTUAN SOSIAL TUNAI/BST
- 10 juta KPM (di luar penerima PKH & Kartu Sembako)
- Rp300.000,-/bulan/KPM selama 6 bulan (Januari – Juni)

BANTUAN BERAS BULOG
- 28,8 juta KPM (PKH, Kartu Sembako, BST)
- 10 Kg/KPM disalurkan 1 kali di bulan Juli
- KPA: Kemenkeu

REALISASI PENYALURAN BANSOS PEN

Per 1 Agustus 2021

PAGU
Rp88.007.628.950.000,-

REALISASI
Rp63.219.583.350.000,- (71,83%)

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

TARGET
10.000.000 KK

ANGGARAN
Rp28.310.134.350.000,-*

DURASI
12 BULAN (4 TAHAP)

REALISASI
Rp19.109.484.325.000,- (67,50%)

PROGRAM KARTU SEMBAKO/BPNT

TARGET
18.800.000 KK

ANGGARAN
Rp42.374.607.200.000,-*

DURASI
14 BULAN

KARTU SEMBAKO USULAN PEMDA
5,9 KPM SELAMA 6 BULAN

REALISASI
Rp28.013.807.000.000,- 66,11%

BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST)

TARGET
10.000.000 KK

ANGGARAN
Rp17.322.887.400.000,-**

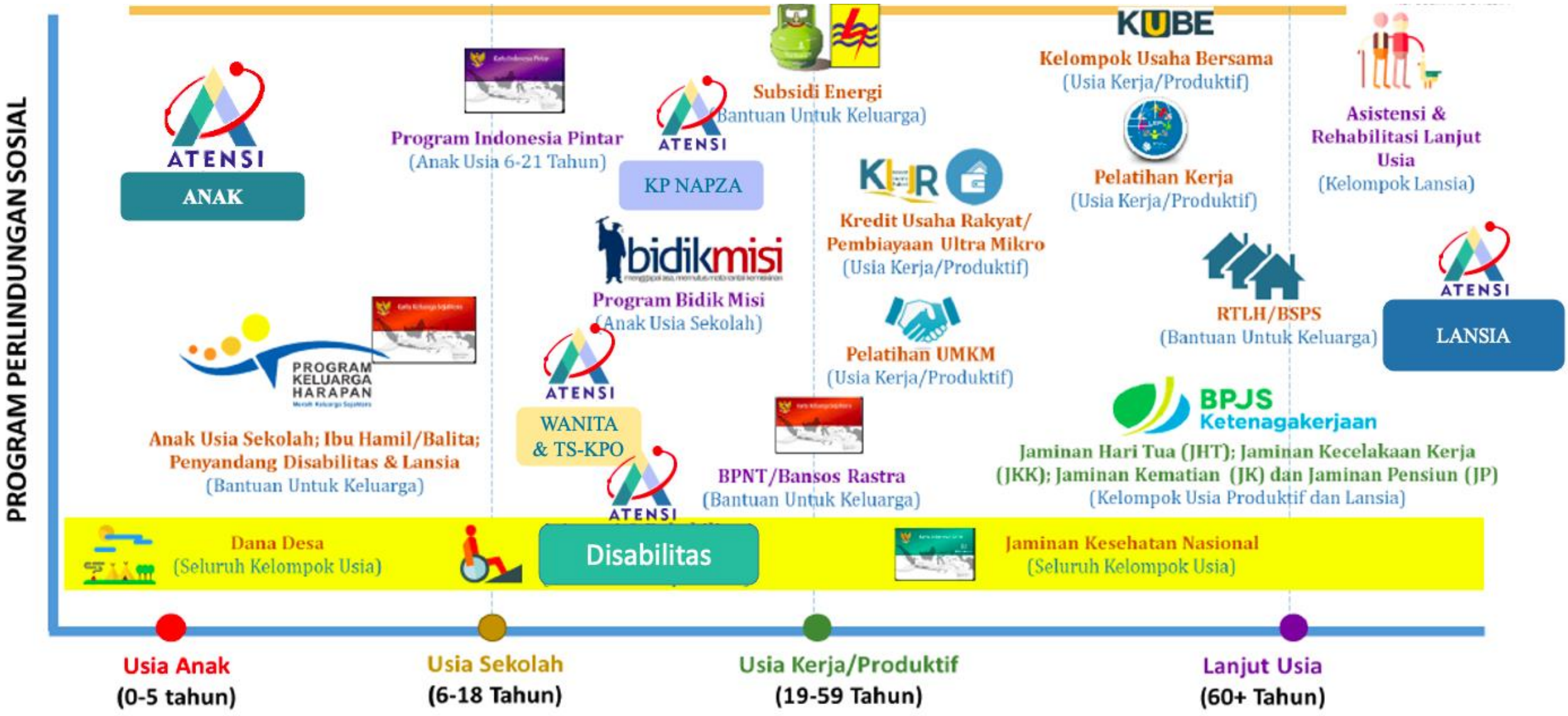
DURASI
6 BULAN

REALISASI
Rp17.181.744.000.000,- 99,19%

* Terdapat realokasi anggaran Bansos PKH dan Kartu Sembako/BPNT untuk mencukupi kebutuhan anggaran Bansos Tunai (BST)

** Terdapat penambahan anggaran dari realokasi bansos PKH dan Kartu Sembako serta BA BUN.

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DI SELURUH SIKLUS KEHIDUPAN



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

ATENSI

TERIMA KASIH